



DHIAN NOVITASARI, FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KOTA YOGYAKARTA
Kolaborasi Program Makan Bergizi Gandeng UMKM se Yogya



KOTA YOGYAKARTA

YOGYA (KR) - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pasangan Prabowo-Gibran telah resmi masuk dalam pembahasan anggaran 2025, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan tim transisi Prabowo-Gibran telah mengalokasikan Rp 71 T untuk program MBG tahap pertama pada 2025.

Anggaran ini direncanakan dengan mempertimbangkan target defisit fiskal sebesar 2,29% - 2,82%. Tahap awal program MBG terutama akan menasar siswa SD, SMP, dan SMA yang termasuk dalam kuartil pertama dan kedua di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T) di Indonesia. Sasaran, anggaran, dan tata kelola program akan terus dikaji dan disempurnakan guna menanggulangi stunting di Indonesia.

Sebagai wakil rakyat, saya berharap inisiatif ini akan terlaksana pada tahun 2025 untuk merangsang pembangunan ekonomi lokal dan memberdayakan sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan ritel lokal sebagai persiapan untuk program MBG. Integrasi pangan berkelanjutan akan dicapai melalui perluasan target secara bertahap. Termasuk juga dengan menggendeng para pelaku

UMKM se Kota Yogya untuk dilibatkan dalam program tersebut.

Penanganan masalah gizi, khususnya stunting di DIY, terkait erat dengan akses terhadap air minum bersih, sanitasi dasar, pendapatan yang memadai, dan pendidikan yang melibatkan banyak sektor. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi stunting secara efektif.

Dengan demikian, pencapaian tujuan program MBG akan menjadi tantangan jika dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang terpisah-pisah. Harus ada koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar kementerian dan lembaga, dengan peran yang ditetapkan dengan baik. Mengingat pembentukan lembaga-lembaga baru dapat menyebabkan inefisiensi, program MBG memerlukan kolaborasi yang kohesif antara berbagai tingkatan pemerintah dan entitas non pemerintah, dengan fokus utama pada peningkatan kesehatan. Kementerian dan lembaga utama yang harus dilibatkan di tingkat pusat meliputi, tetapi tidak terbatas pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Bappenas, dan BPOM, hingga pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan program makanan bergizi gratis dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

(Dhi)-f



KR-Ardhi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005